# PENGKLASIFIKASIAN DESA BERDASARKAN RATA-RATA REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DESA DI 38 KABUPATEN SE-SUMATERA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS DISKRIMINAN

**SKRIPSI SARJANA MATEMATIKA**

**Oleh**

**CITRA TRI WIDYA**
**No.BP : 06 134 013**

**JURUSAN MATEMATIKA**
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
**UNVERSITAS ANDALAS**
**PADANG**
**2010**

# ABSTRAK

Analisis Diskriminan (*Discriminant Analysis*) merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan variabel penciri yang membedakan kelompok. Pada penelitian ini, analisis diskriminan digunakan untuk mengetahui variabel penciri yang membedakan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan (*rural*) dengan desa perkotaan (*urban*) di 38 kabupaten se-Sumatera dan mengelompokkan desa. Dari hasil analisis diperoleh variabel pendapatan asli desa yang berperan sebagai variabel penciri yang membedakan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan (*rural*) dengan desa perkotaan (*urban*) di 38 kabupaten se-Sumatera. Suatu desa dapat dikelompokkan menjadi desa pedesaan (*rural*) jika pendapatan asli desanya lebih besar dari Rp 208.509.944 dan desa perkotaan (*urban*) jika pendapatan asli desanya lebih kecil atau sama dengan Rp 208.509.944.



**Kata kunci** : *Analisis diskriminan, variabel penciri, realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perlu adanya usaha-usaha ke arah peningkatan dalam melaksanakan pembangunan dan memantapkan penyelenggaraan pemerintah, mulai dari pemerintah tingkat pusat sampai ke pemerintah terendah yaitu desa/kelurahan [3]. Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Yang dimaksud dengan desa dalam undang-undang ini adalah desa (desa pedesaan/*rural*) dan kelurahan (desa perkotaan/*urban*), sehingga dengan demikian yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa (desa pedesaan/*rural*) dan pemerintah kelurahan (desa perkotaan/*urban*).

Berdasarkan jenis mata pencahariannya, desa pedesaan (*rural*) adalah desa yang mayoritas masyarakatnya beraktivitas sebagai petani, sedangkan desa perkotaan (*urban*) adalah desa yang perkembangannya mengarah seperti kota tetapi masih ada pengaruh kehidupan agraris dan aktivitas masyarakatnya lebih beragam dibanding desa pedesaan (*rural*) [14]. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain yang sesuai dengan karakteristik adat istiadat daerah setempat, misalnya di Sumatera Barat disebut

dengan istilah nagari, sedangkan di Papua, Kutai Barat dan Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung.[2]

Untuk menyukseskan pembangunan di segala bidang dan guna mencapai cita-cita nasional sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur, maka diperlukan usaha untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Desa agar tidak hanya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan administrasi desa yang makin luas dan kompleks, serta dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan baik dan tertib. Dengan adanya pengklasifikasian desa menjadi desa pedesaan (*rural*) dan desa perkotaan (*urban*), maka perlu diketahui perbedaan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara kedua desa, agar Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan keuangan yang tepat. Untuk mengetahui perbedaan realisasi penerimaan dan pengeluaran tersebut, maka dilakukan Analisis Diskriminan.

Analisis diskriminan digunakan untuk mengetahui variabel-variabel penciri yang membedakan kelompok dalam suatu populasi. Analisis diskriminan dilakukan berdasarkan perhitungan statistik terhadap kelompok yang terlebih dahulu sudah diketahui terklasifikasi secara jelas.

Pada penelitian ini, analisis diskriminan digunakan untuk menentukan perbedaan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan (*rural*) dengan desa perkotaan (*urban*). Dari analisis diskriminan diperoleh fungsi diskriminan yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel-variabel penciri yang sangat berpengaruh dalam membedakan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan (*rural*) dengan desa perkotaan (*urban*) dan menduga kelompok untuk suatu objek baru.

# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Dari analisis diskriminan yang dilakukan, diperoleh fungsi diskriminan yang dapat membedakan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan (*rural*) dengan desa perkotaan (*urban*), yaitu:

$$Y = 6.134x10^{-9}X_1$$

Berdasarkan fungsi diskriminan di atas, diperoleh pendapatan asli desa ($X_1$) yang berperan sebagai variabel penciri yang membedakan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan (*rural*) dengan desa perkotaan (*urban*). Jadi, suatu desa dapat dikelompokkan menjadi desa pedesaan (*rural*) jika pendapatan asli desanya lebih besar dari Rp208.509.944 dan desa perkotaan (*urban*) jika pendapatan asli desanya lebih kecil atau sama dengan Rp 208.509.944. Berdasarkan nilai *hit ratio*, yaitu 72.37% maka dapat disimpulkan bahwa fungsi diskriminan yang dibentuk dianggap layak untuk membedakan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan (*rural*) dengan desa perkotaan (*urban*) dan menduga kelompok untuk suatu desa di 38 kabupaten se-Sumatera.

## DAFTAR PUSTAKA


[1] Anonim. *Pengertian Desa*. http://google.com/pengertiandesa, diambil tanggal 08 Maret 2010.

[2] Anonim. *Desa*. http://google.com/namalaindesa, diambil tanggal 10 Mei 2010.

[3] Badan Pusat Statistik. 2008. *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2006*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

[4] Cooper, D. R. dan W. E. Morry. 1999. *Metode Penelitian Bisnis Jilid II*. Erlangga, Jakarta.

[5] Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Salemba Empat, Jakarta.

[6] Irja, T. D. 2008. Analisa Faktor-faktor Praktek Perataan Laba Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang terdaftar di BEJ Dengan Menggunakan Analisis Diskriminan. *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan.

[7] Johnson, R. A. 1992. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Prentice-Hall, Inc. , New Jersey.

[8] Kusumawati, R, dkk. 2003. Analisis Diskriminan Untuk Melihat Misklasifikasi Mahasiswa FMIPA Angkatan 1998/1999 Universitas Jember. *Jurnal Ilmu Dasar* Vol. 4 No. 2 : 77-82.

[9] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.

[10] Morrison, D. F. 1978. *Multivariate Statistical Methods*. Mc Graw-Hill Book Company, Japan.

[11] Santoso, S. 2002. *SPSS Statistik Multivariate*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

[12] Subyakto, A. 1999. Perbandingan Analisis Diskriminan Kuadratik dan Regresi Logistik dan Pengklasifikasian Negara-negara di Dunia Berdasarkan Peubah-peubah Sosial Ekonomi. *Skripsi-S1*, "tidak diterbitkan". FMIPA IPB, Bogor.

[13] Supranto, J. 2004. *Analisis Multivariat, Arti dan Interpretasi*. PT Rineka Cipta, Jakarta.